

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Wilayah Penelitian

a. Gambaran Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Karst Kabupaten Gunungkidul

Kawasan Karst Kabupaten Gunungkidul dengan wilayah yang cukup luas, berpotensi terjadi degradasi lingkungan yang disebabkan oleh karena kondisi lingkungan fisiknya secara alami, dan akan lebih diperparah lagi apabila aktivitas manusia kurang arif terhadap kelestarian fungsi lingkungan, bahkan cenderung bersifat merusak lingkungan.

Untuk menciptakan kualitas lingkungan hidup yang baik, pembangunan di Kabupaten Gunungkidul perlu memprioritaskan penanganan masalah lingkungan dengan menangani kerusakan-kerusakan lahan yang telah terjadi. Selain itu untuk menanggulangi bertambah luasnya kerusakan lahan juga diperlukan usaha-usaha untuk mengenali sifat dan perwatakan lahan pada setiap satuan wilayah di Kabupaten Gunungkidul yang mudah mengalami kerusakan.

Kawasan karst Kabupaten Gunungkidul banyak menyimpan potensi yang sangat besar, mulai dari keindahan alamnya yang eksotis seperti: pantai, gua-gua di dalam perut bumi

yang unik dan menarik, sampai pada sistem hidrologi bawah tanahnya. Berbagai potensi sumberdaya alam kawasan karst dapat diuraikan berikut ini.

1) Potensi fisik kawasan karst

Potensi fisik di kawasan karst Kabupaten Gunungkidul memungkinkan untuk dikembangkan berdasarkan karakteristik wilayahnya. Kawasan dengan fungsi tertentu seperti pariwisata yang memanfaatkan potensi alami, seperti telaga, cagar budaya, bukit-bukit karst, dan pertanian tanaman pangan. Potensi sumberdaya air yang cukup besar, khususnya sistem sungai bawah tanah, pantai, mataair dan telaga, lebih dioptimalkan pemanfaatannya untuk berbagai kepentingan pembangunan.

Sungai bawah tanah (SBT) Bribin, Kabupaten Gunung Kidul, merupakan salah satu sungai yang mempunyai potensi besar dan menjadi tumpuan pemenuhan air domestik masyarakat di kawasan karst Gunungsewu. Terlebih lagi, daerah ini dikenal sebagai daerah yang sulit air karena aliran sungai mencapai 100 meter di bawah permukaan tanah sehingga sulit dimanfaatkan.

Pemboran dan pembuatan bendungan bawah tanah dengan sistem mikrohidro di Gua Bribin diharapkan dapat meningkatkan kapasitas layanan distribusi air tanah karst

menjadi dua kali lipat dari sebelumnya. Dengan proyek ini diharapkan ada kelangsungan sumber daya air tanah Bribin dalam waktu yang panjang. Selama ini, penambangan karst oleh penduduk sekitar memengaruhi suplai air di bawah tanah SBT Bribin. Padahal, kawasan karst merupakan kawasan bebatuan karbonat yang memiliki kandungan air melimpah. Kandungan air yang besar disebabkan adanya celah pada batuan sehingga air dapat meresap jauh dan tersimpan dalam batuan.

Tabel 2. Sistem Sungai Bawah Tanah pada Ekosistem Perbukitan Karst

No	Nama Gua	Debit Aliran (Liter/detik)
1	Luweng Buh Putih	25
2	Luweng Seropan	170
3	Gua Ngremeng	75
4	Kali Suci - Goa Mburi Omah - Luweng Grubug	390 680
5	Kali Bribin	1500
6	Goa Gilap	20
7	Goa Jomblang	200

(Sumber : Sistem Informasi Air Baku, 2005)

2) Potensi biotik kawasan karst

Batuan penyusun kawasan karst merupakan jenis batuan yang mudah mengalami pelarutan, sehingga banyak terbentuk gua-gua, sistem sungai bawah tanah, dan pantai-pantai dengan hamparan pasir putihnya. Pada masing-masing fenomena bentanglahan tersebut, tentunya akan mempunyai kekhasan dalam keanekaragaman hayati, seperti: ular atau

melata khas semak belukar karst, kelelawar dalam gua, burung walet pada gua di tebing cliff pantai, atau habitat penyu di pantai-pantai berpasir putih (Wediombo, Siung, Ngropoh, Sepanjang, dan sebagainya).

3) Potensi budaya kawasan karst

Budaya masyarakat pada kawasan karst Kabupaten Gunungkidul seperti rosulan dan sebagainya, atau bentuk-bentuk kearifan lokal lainnya, juga berpengaruh terhadap kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan di sekitarnya.

4) Potensi sosial kawasan karst

Lapangan usaha utama penduduk dan sebagian besar masyarakat di kawasan karst pada sektor pertanian menunjukkan bahwa kawasan karst Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah agraris dengan penduduk yang bergerak di bidang pertanian.

5) Potensi ekonomi kawasan karst

Secara makro struktur perekonomian di kawasan karst Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh sektor pertanian dengan tekanan pada pertanian tanaman tahunan atau tanaman lahan kering. Prioritas utama sektor perekonomian adalah memacu pertumbuhan ekonomi berbasis usaha kecil, menengah dan industri lokal. Upaya pengembangan sektor perdagangan dan jasa di Kabupaten Gunungkidul terus ditingkatkan. Selain

itu, untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sektor lain yang diharapkan prospektif dapat memberikan kontribusi besar adalah sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan.

Dibalik potensi sumberdaya alam dan sosial ekonomi tersebut, kawasan karst juga menyimpan berbagai permasalahan yang cukup serius dalam rangka pengelolaan lingkungannya, baik fisik maupun sosial ekonomi di kawasan karst Kabupaten Gunungkidul tersebut dikhawatirkan dalam jangka panjang akan semakin memicu kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan di wilayah ini, di samping kondisi fisik alami lingkungan yang memang rentan terhadap kerusakan.

Dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan pengelolaan kawasan karst yang bertujuan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul, maka dalam penelitian ini dapat diperinci tiga aspek pemahaman konsep keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. Pertama, keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri masyarakat kawasan karst di Kabupaten Gunungkidul.

Kedua, keberlanjutan lingkungan yakni sistem keberlanjutan harus memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi ekologi lingkungan. Konsep keberlanjutan lingkungan ini menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi. Ketiga yaitu keberlanjutan sosial, yaitu keberlanjutan yang mampu mencapai kesetaraan dalam penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik masyarakat kawasan karst di Kabupaten Gunungkidul.

b. Gambaran Tempat Penelitian

Dalam pengelolaan kawasan karst Kabupaten Gunungkidul tidak hanya di amanahkan kepada salah satu instansi atau organisasi saja. Hampir semua pengelolaan kawasan karst melibatkan partisipasi pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara substansial dalam suatu kemitraan strategis. Kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai pelaksana urusan pemerintahan wajib dan yang mempunyai yang mempunyai tugas atau wewenang dalam peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam proses pengelolaan kawasan karst di Kabupaten Gunungkidul.

2. Deskripsi Hasil Penelitian

a. Pengelolaan Kawasan Karst Melalui Prinsip Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul

Berdasarkan pada hasil pengamatan, wawancara serta dokumentasi dapat dijelaskan berbagai upaya pengelolaan yang telah dilakukan yang terkait dengan permasalahan kawasan karst di Kabupaten Gunungkidul melalui prinsip pembangunan berkelanjutan seperti diuraikan sebagai berikut ini :

1) Pengelolaan Kawasan Karst Melalui Prinsip Keberlanjutan Ekonomi.

Kondisi geografis kawasan karst yang dinilai kurang menguntungkan untuk dijadikan lahan pertanian maupun perkebunan dijadikan alasan beberapa masyarakat penambang untuk melakukan kegiatan penambangan batuan gamping di kawasan karst Kabupaten Gunungkidul. Setelah adanya upaya perlindungan kawasan karst berupa pemberlakuan larangan terhadap aktifitas penambangan batu gamping, maka masyarakat yang sebelumnya berprofesi sebagai penambang batu gamping secara tidak langsung penghasilan dari kegiatan menambang batu gamping berkurang akibat dari pemberlakuan pelarangan penambangan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan

wawancara dengan salah satu penambang batu gamping di
Desa Gari Kecamatan Wonosari :

“... ya begini nasib kami, bekerja sebagai petani sudah susah *mas* kalau sawahnya cuman sempit. Hasil dari bertani juga tidak dapat dinikmati langsung apalagi sehabis masa tanam seperti ini oleh sebab itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masih kekurangan sedangkan sekarang untuk mencari penghasilan tambahan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dari menambang dilarang sama pemerintah.” (wawancara tanggal 22 Agustus 2013).

Agar perekonomian masyarakat kawasan karst dapat terus berlanjut tanpa mengorbankan rusaknya lingkungan kawasan karst maka dari itu pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul memiliki tugas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan karst.

Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dihitung berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul berdasarkan data *series* pada tahun 2009, 2010 dan 2011 memiliki kecenderungan naik. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3. PDRB Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011 Atas Dasar Harga Konstan Berlaku Tahun 2000 (Rp Jutaan) Menurut Lapangan Usaha

No	Lapangan Usaha	2009	2010**	2011***
1	Pertanian	1.272.290	1.268.080	1.279.456
2	Pertambangan dan galian	55.939	58.472	60.880
3	Industri Pengolahan	341.216	368.432	391.485
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	17.760	18.999	19.780
5	Bangunan	261.856	279.518	299.185
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	467.680	496.688	525.156
7	Pengangkutan dan Komunikasi	220.126	234.644	251.865
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	145.597	159.910	171.605
9	Jasa – Jasa	414.901	445.345	437.747
PDRB Konstan		3.197.365	3.330.079	3.473.159
Pertumbuhan PDRB per tahun (%)		4,14	4,15	4,30

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul (**angka sementara, ***angka sangat sementara))

Pertumbuhan tersebut cenderung lambat terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di DIY apabila dilihat dari PDRB tingkat pendapatan perkapitanya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Sleman, Kota Yogyakarta, dan Bantul. PDRB per kapita Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2011 yang dihitung berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 10.540.248,- per tahun (Rp 878.354 / bulan). Dengan demikian dapat diartikan bahwa kesejahteraan masyarakat secara umum masih belum mencapai derajat kesejahteraan yang layak, hal

tersebut dikarenakan tingkat pendapatan masyarakat Gunungkidul masih di bawah upah minimal regional Provinsi DIY tahun 2012 yang ditetapkan sebesar Rp 892.660. (Sumber : Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul 2013)

Dari tabel 3 diatas dapat diambil pendapat bahwa kontribusi sektor ekonomi Kabupaten Gunungkidul yang masih di dominasi oleh sektor pertanian, tingkat pendapatan masyarakat masih di bawah upah minimal regional Provinsi DIY hal ini didasari juga oleh kemampuan masyarakat yang ditunjang dari faktor keahlian dan keterampilan yang dimiliki karena kurang ada dukungan pendidikan formal atau non formal sehingga sebagian besar masyarakat Kabupaten Gunungkidul yang bekerja sebagai petani hanya mempunyai alternatif pekerjaan menjadi buruh atau penambang batu gamping. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang penambang batu gamping di Desa Piyaman :

“... saya ini hanya lulusan Sekolah Dasar mas, sehari-hari kalau tidak bertani ya menjadi buruh atau menjadi penambang batu gamping ini sehingga bisa mendapat uang dengan cepat dan halal untuk memberi makan anak, istri dan memenuhi kebutuhan lainnya.” (wawancara tanggal 22 Agustus 2013)

Masyarakat yang bekerja sebagai petani sebagian besar dari mereka hanya mengenyam pendidikan sampai dengan Sekolah Dasar. Untuk memberikan gambaran riil tentang tingkat pendidikan yang dimiliki oleh Kepala Keluarga di Kabupaten Gunungkidul seperti yang tertuang dalam tabel 4 berikut ini :

Tabel 4. Jenjang Pendidikan Kepala Keluarga di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Tidak / Belum Sekolah	46.991
2	Tidak tamat SD / Sederajat	13.685
3	Tamat SD	93.195
4	Tamat SLTP	45.329
5	Tamat SLTA	36.881
6	Diploma I / II	2.686
7	Diploma III	1.816
8	Diploma IV / S1	5.128
9	S2	476
10	S3	123

(Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul)

Rata-rata lama sekolah juga merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pembangunan manusia di suatu wilayah. Rata-rata lama belajar ini sebagai salah satu pendukung ketersediaan sumberdaya terampil dan sekaligus agen-agen pembangunan. Perbaikan kualitas hidup masyarakat hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperbaiki kualitas pendidikannya. Salah satu bentuk kepedulian untuk memperbaiki kualitas pendidikan dari pemerintah daerah

Kabupaten Gunungkidul terhadap masyarakat penambang adalah dengan adanya Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang direalisasikan melalui intervensi beberapa program. Program-program untuk mendukung peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah seperti yang terdapat dalam tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian (%)
1	Presentase pendidikan non formal yang memenuhi standar mutu	Persen	83,39	107,93
2	Presentase anak putus sekolah yang menyelesaikan kejar paket A, B dan C	Persen	19,97	494,74
3	Presentase desa yang memperoleh layanan perpustakaan	Persen	29,5	104,53
	• Pembentukan Perpustakaan		49	90,96
	• Layanan perpus keliling		10	118,10

(Sumber Laporan Evaluasi Tahunan SKPD Tahun 2011)

Pemberdayaan oleh pemerintah daerah dalam bidang pendidikan seperti Program Pendidikan Non Formal melebihi dari target yang ditentukan dikarenakan sudah adanya kesadaran dari masyarakat untuk meningkatkan taraf pendidikannya yang bertujuan juga untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan sehingga diharapkan modal tersebut

dapat juga membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan karst. Masyarakat setempat pada umumnya sudah mengenali lingkungan karst di sekitarnya secara baik. Dengan melakukan sosialisasi arti dan fungsi lingkungan biotik dan abiotik karst (termasuk kekhasan budaya setempat) ke dalam bahasa yang sederhana, maka pemahaman masyarakat tentang lingkungan alam di sekitarnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Supaya pengetahuan masyarakat tetap terpakai, di dalam program pengembangan masyarakat dapat direncanakan kegiatan pelatihan pemandu wisata. Pemandu wisata setempat ini sangat penting, mengingat kedatangan wisatawan tidak selalu disertai oleh pemandu dari suatu biro perjalanan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Suryono Hadi selaku Asisten Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul:

“... beberapa kawasan karst yang akhir-akhir ini sedang ramai dibuka untuk dipromosikan guna menjadi daya tarik wisatawan dari luar Kabupaten Gunungkidul sedang berkembang secara pesat. Jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Gunungkidul untuk menikmati keindahan alam kawasan karst meningkat drastis, hal ini tidak dibersamai dengan sumberdaya pemandu wisata yang memadai sehingga banyak sekali wisatawan dari luar Kabupaten Gunungkidul kebingungan saat tiba disini. Oleh karena hal tersebut kami dari pemerintah daerah mempunyai alternatif dengan memberikan kepelatihan melalui program pemandu wisata sebagai bentuk pemberdayaan terhadap beberapa kelompok

masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai penambang batu gamping.” (wawancara tanggal 1 Oktober 2013)

Pendidikan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat setempat di dalam mengenali keunikan dan kekhasan kawasan karst, serta menciptakan *interpreneurship*. Aspek ekonomi dari pengelolaan dan pengembangan kawasan karst memiliki sasaran menaikkan kesejahteraan masyarakat setempat.

2) Pengelolaan Kawasan Karst Melalui Prinsip Keberlanjutan Lingkungan atau Keberlanjutan Ekologi.

Permasalahan lingkungan kawasan karst secara keseluruhan hampir sama yaitu akibat kerusakan lahan akibat penambangan bahan galian C, kerusakan lahan akibat longsor, dan kerusakan alami akibat kekritisian secara meteorologis. Di antara ketiga penyebab kerusakan lahan tersebut, faktor penambangan bahan galian C yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap kerusakan lingkungan di kawasan karst Kabupaten Gunungkidul.

Konservasi kegiatan pengelolaan dan pengembangan karst mencakup pelestarian terhadap unsur alam dan unsur budaya. Daya tarik kawasan karst akan lestari selama komponen yang menyusun daya-tariknya terlindungi. Dari aspek alam, nilai keindahan, keunikan, dan kelangkaan unsur

atau komponen bentang alam karst akan terawetkan dengan baik jika proses karstifikasi (pelarutan) tidak mengalami gangguan. Gangguan yang disebabkan oleh alam tidak masuk dalam kriteria, karena proses geologi yang menciri sifat dinamis bumi akan terus berlangsung selama ruang dan waktu masih tersedia. Gangguan paling besar justru berasal dari kegiatan manusia, yang sadar atau tidak sadar telah menurunkan fungsi dan daya dukung lingkungan yang nilainya sudah rendah.

Sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan bagi kehidupan, pemerintah daerah melalui berbagai program yang diluncurkan melalui Kementerian Lingkungan Hidup telah melaksanakan beberapa program pembangunan yang berwawasan lingkungan. Agar dampak dari kegiatan pembangunan tersebut tidak berimbas buruk bagi kelestarian lingkungan hidup yang sehat dan layak bagi kepentingan generasi sekarang dan mendatang, untuk mendukung hal tersebut perlu adanya kelembagaan pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang ada di kabupaten Gunungkidul ini dilaksanakan melalui beberapa program dengan indikator dan capaian target untuk masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6. Capaian Kinerja Indikator Pelestarian Lingkungan Hidup

No	Indikator Kerja	Satuan	Target	Capaian (%)
1	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Persen	100	72,04
2	Konservasi pada habitat khusus	Ha	142,5	94,49
3	Jumlah sumber mata air yang dikonservasi	Buah	4	125
4	Jumlah Kelompok masyarakat peduli/pemerhati lingkungan			126,6
5	Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan	Persen	60	40
6	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Persen	70	78,55
7	Persentase kelengkapan data informasi status lingkungan	Persen	60	83,33
8	Persentase kawasan pemukiman yang memiliki sanitasi penanganan sampah	Persen	23,43	100
9	Persentase kawasan pemukiman yang memiliki sanitasi pengelolaan limbah rumah tangga	Persen	47,76	100
10	Rasio ruang terbuka hijau	Persen	77	100
11	Jumlah unit usaha/kegiatan yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan	Unit	219	97,72
12	Persentase penurunan penambangan liar	Persen	25	100
13	Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persen	18,98	100
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN			100	86,98

(Sumber : Analisa dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011)

Dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan sebagai upaya pengelolaan sumberdaya kawasan karst secara bijaksana, berkesinambungan agar terjaga keseimbangan ekosistem yang ada, terkait dengan hal tersebut perlu antisipasi terhadap konsekuensi logis

timbulnya dampak (perubahan) terhadap lingkungan sebagai akibat dari proses pembangunan. Kawasan karst Kabupaten Gunungkidul yang masuk dalam Zonasi Kawasan Lindung Nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 seharusnya sudah tidak dapat lagi dimanfaatkan untuk kegiatan penambangan. Namun hingga saat ini kegiatan penambangan masih terus berjalan, baik penambangan rakyat/liar maupun untuk beberapa usaha pertambangan perusahaan yang masih mempunyai izin usaha hingga tahun 2020. Masyarakat penambang yang masih melakukan kegiatan penambangan selalu mempunyai berbagai alasan untuk tetap dapat melakukan kegiatan penambangan di kawasan karst Kabupaten Gunungkidul. Seperti pernyataan salah seorang penambang batugamping di Desa Karangtengah Kecamatan Wonosari saat wawancara:

“... warga dihadapkan pada kondisi sosial yang cukup berat untuk memilih antara melakukan penambangan untuk kebutuhan hidup sehari-hari atau terus menambang akan tetapi berdampak pada kerusakan wilayah karst di Gunung Kidul. Kami tahu bahwa kawasan karst merupakan kawasan yang dilindungi oleh perundang-undangan. Kami juga ingin berhenti melakukan penambangan jika ada usaha lain yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. “Kami ingin berhenti, kalau sudah ada kegiatan usaha lain untuk memenuhi kebutuhan harian.” (wawancara tanggal 3 September 2013)

Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertambangan bekerja sama

Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Gunungkidul sering melakukan peninjauan / kontrol lapangan terhadap lokasi-lokasi penambangan yang berizin maupun yang tidak berizin untuk selanjutnya dilakukan pendataan secara terinci. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan melakukan koordinasi dengan masyarakat penambang baik yang berizin maupun yang tidak berizin untuk segera melakukan reklamasi terhadap sisa-sisa lokasi penambangan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu penambang di Dusun Kajar Desa Karangtengah Kecamatan Wonosari :

“... kami dikoordinasi oleh Dinas Pertambangan untuk melakukan kegiatan pemulihan lahan bekas penambangan dengan cara meratakan atau menghabiskan bukit-bukit sisa yang telah ditambang dan menimbun lubang-lubang bekas penambangan yang selanjutnya dapat diolah menjadi lahan pertanian. Kami juga mendapatkan bantuan dari Dinas Kehutanan berupa bibit tanaman dalam bentuk konservasi yang berjumlah 1500 bibit tanaman keras produktif seperti kelapa, mangga, pete, sukun dan jati. (wawancara tanggal 3 September 2013)

Upaya reklamasi yang dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan penambang batu gamping selain bertujuan untuk mengurangi dampak kerusakan atau kekritisian lahan akibat proses penambangan batu gamping juga bertujuan untuk tetap melestarikan lingkungan kawasan karst untuk generasi yang akan datang. Serta hasil dari tanaman

keras produktif yang ditanam dilahan bekas penambangan dapat digunakan oleh masyarakat disekitar kawasan karst untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup dimasa sekarang.

3) Pengelolaan Kawasan Karst Melalui Prinsip Keberlanjutan Sosial.

Karakteristik sosial budaya masyarakat Gunungkidul adalah masyarakat tradisional yang masih memegang teguh budaya luhur warisan nenek moyang. Sehingga dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah daerah berupaya untuk mengadopsi karakteristik sosial budaya agar dapat berimprovisasi dengan kultural masyarakat yang ada. Pengelolaan kawasan karst dengan tujuan untuk keberlanjutan sosial oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan cara memaksimalkan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat sangat penting artinya dalam rangka pengelolaan kawasan tambang dan reklamasi lahan bekas penambangan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suatu kelompok kerja yang mempunyai hak dan tanggung jawab secara bersama, menghindari konflik sosial, dan menciptakan budaya kearifan lokal dalam penanganan masalah lingkungan pasca penambangan. Oleh karena itu, bagi wilayah-wilayah penambangan yang belum ada kelompok atau organisasinya, segera untuk dibentuk. Kelompok penambangan

yang sudah ada: Kelompok Penambang Bedoyo, Candirejo, Gondangrejo, Gari, Gatak dan Kajar. Pembentukan kelompok penambang bertujuan agar terjadi kesetaraan dan tidak ada rasa iri antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Dengan adanya kelompok penambang, pemerintah daerah juga lebih mudah membangun partisipasi masyarakat penambang dan kesadaran akan pentingnya melestarikan lingkungan kawasan karst untuk generasi yang akan datang.

Aspek partisipasi masyarakat yang berupa pemberdayaan masyarakat setempat mempunyai sasaran membuka peluang usaha yang menunjang kelestarian dan membangun hubungan kemitraan. Masyarakat setempat adalah agen pembangunan yang perlu dilibatkan sejak awal pembangunan diselenggarakan. Kehadiran masyarakat yang sudah menjadi penghuni kawasan karst secara turun temurun dapat membentuk komunitas yang bertindak sebagai perusak sekaligus pelestari lingkungan karst. Program pengembangan masyarakat harus dapat mendaya- dan menghasil-gunakan penduduk setempat dengan segala aspek. Hubungan kemitraan yang terjalin antara pemerintah, pengembang, dan stakeholder lainnya dengan masyarakat setempat diproyeksikan dapat membuka kesempatan dan peluang usaha yang mendukung kesejahteraan masyarakat di kawasan karst.

Bentuk pengembangan masyarakat tersebut adalah dalam pengembangan daya tarik objek wisata kawasan karst di Kabupaten Gunungkidul. Pelaksanaan pengembangan masyarakat adalah dalam program pendidikan kewanitaian atau program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yaitu program untuk dapat mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang pengembangan dan pengelolaan kawasan karst yang baik dan benar dan secara arif bijaksana melalui prinsip pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Pramudji selaku Kepala Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) :

“... kami dari aparat pemerintahan daerah juga melakukan pemberdayaan bagi para masyarakat penambang mas, seperti pemberian beasiswa pendidikan kepada para anak-anak dari para penambang batu gamping oleh Dinas Pendidikan; pelatihan pembuatan kerajinan yang dikelola oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan pendidikan pemandu wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata.” (wawancara tanggal 31 September 2013)

Selama kegiatan itu sepenuhnya mendasarkan pada *community based tourism* (CBT), maka di Kabupaten Gunungkidul akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Peluang memperoleh keuntungan akan diperoleh penduduk setempat antara lain melalui penjualan makanan, minuman, cinderamata,

jasa parkir, jasa sanitasi, jasa pemandu wisata, dan sebagainya. Naiknya pendapatan itu tentunya tidak hanya dirasakan penduduk setempat tetapi juga juga oleh masyarakat sekitarnya. Selama daya tarik keindahan, keunikan dan kelangkaan sebuah objek wisata kawasan karst dapat dipertahankan, nilai ekonomi yang diperoleh penduduk setempat dapat diproyeksikan untuk jangka waktu yang lama.

b. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pengelolaan Kawasan Karst Melalui Prinsip Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul

Perlu mendapatkan perhatian secara khusus, bahwa masyarakat melakukan penambangan karena memang secara alamiah dan kodrati, itulah yang akan mereka lakukan. Hal ini terkait dengan kondisi lingkungan dan alam sekitarnya, serta kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (aspek sosial dan ekonomi). Oleh karena itu, kegiatan penambangan menjadikan tumpuan hidup mereka, dan bukan untuk dilarang, tetapi untuk diarahkan pada bentuk pengelolaan yang benar, demi menjaga kelestarian fungsi lingkungan bagi anak cucu mendatang. Dari hasil penelitian didapat faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pengelolaan kawasan karst sebagai berikut :

- 1) Beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan kawasan karst melalui prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai berikut :
 - a) Beralasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, kegiatan penambangan oleh masyarakat masih berlangsung hingga saat ini. Makin besarnya tekanan penduduk dan hasil yang didapatkan dari pertanian tidak menentu. Sehingga banyak masyarakat di kawasan karst beralih profesi atau sekedar mencari tambahan penghasilan dari yang sebelumnya bertani ditambah bekerja sebagai penambang batugamping. Besarnya keuntungan ekonomi dari kegiatan menambang, tetapi karena kegiatan penambangan itu tidak dikelola dengan baik, masyarakat merasakan akibat buruk dari kegiatan tersebut. Banyak sumber mataair yang hilang, hutan yang gundul karena pembukaan lahan untuk penambangan menyebabkan banyak hewan seperti kera ekor panjang yang mencuri makanan dirumah penduduk dan longsor lahan yang sering terjadi ketika musim hujan tiba.
 - b) Dengan diterapkannya PP No 28 Tahun 2008 menimbulkan permasalahan antara pembangunan fisik dalam hal ini yang berkaitan dengan pemenuhan bahan baku batu gamping yang bertentangan dengan pelestarian lingkungan dalam hal ini berupa sumberdaya air, flora dan fauna, arkeologis, ilmu pengetahuan, potensi pariwisata. Salah satu contoh pada masyarakat di wilayah penambangan karst seperti di sekitar

DAS Bribin sudah sangat tergantung secara ekonomis terhadap kegiatan penambangan batu gamping, pada sisi yang lain semakin rusaknya lingkungan kawasan karst yang mengancam potensi sumberdaya air sungai bawah tanah dibawah kawasan karst yang ditambang tersebut.

- c) Sudah adanya peraturan dan penerapan mengenai zonasi kawasan karst namun pemerintah pusat belum memberikan justifikasi/rujukan terhadap pemetaan kawasan karst sehingga pemetaan dan data yang dimiliki pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul tentang kawasan karst lindung (zona inti) dan kawasan karst budidaya (kawasan peruntukan pertambangan dari penegakan perda) masih belum lengkap dan detil. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Pramudji selaku Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral :

“... kami masih menunggu keputusan pemetaan kawasan karst dari Kementerian ESDM, sehingga kami belum bisa menerapkan peraturan tentang penetapan kawasan bentang alam karst Gunungkidul.” (wawancara tanggal 31 September 2013)

- d) Tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah terutama pada sektor pertanian yang merupakan bidang pekerjaan terbesar bagi masyarakat di kawasan karst, hal ini dikarenakan kurangnya keterampilan khusus yang dimiliki masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang kemudian

beralih profesi dari sektor pertanian menjadi penambang batugamping.

- e) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia salah satunya yang mengakibatkan peraturan tidak secara langsung dapat diterapkan kepada masyarakat penambang. Penerapan langsung peraturan secara tegas oleh pemerintah membuat masyarakat penambang banyak melakukan demonstrasi tambang karena merasa kawasan yang ditambang merupakan tanah milik rakyat sendiri dan punya masyarakat memiliki surat-surat yang sah atas tanah yang mereka kelola. Sehingga kegiatan penambangan masih ada yang berlangsung hingga saat ini walaupun dari pemerintah daerah sudah tidak mengeluarkan izin untuk penambangan batugamping.
- 2) Sedangkan berikut adalah faktor pendukung dalam pengelolaan kawasan karst melalui prinsip pembangunan berkelanjutan :
- a) Pembinaan oleh pemerintah daerah dalam hal ini yang dikelola oleh Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan melaksanakan program pembinaan kampung hijau, keanekaragaman hayati dalam bentuk lomba lingkungan dan upaya penghijauan kawasan karst Kabupaten Gunungkidul. Realisasi kegiatan dalam bentuk bantuan 1500 bibit tanaman keras produktif dalam bentuk

konservasi yang diberikan pemerintah provinsi bekerjasama dengan pemerintah daerah yang diberikan kepada masyarakat untuk ikut serta melestarikan lingkungan kawasan karst yang telah di konservasi.

- b) Sosialisasi oleh beberapa instansi, terutama sosialisasi tentang regulasi lingkungan hidup yang dilakukan Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Gunungkidul di seluruh kecamatan yang merupakan kawasan penambangan batugamping. Sosialisasi berbagai program pembangunan dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kelestarian fungsi lingkungan lebih efektif dan efisien, di samping dengan memanfaatkan potensi-potensi LSM yang ada, juga dilakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam bentuk program KKN Tematik atau Sibernas. Hal ini dapat dilakukan secara efektif karena waktu kontak antara mahasiswa KKN dengan masyarakat yang relatif lama dan intensif, serta lebih efisien dalam hal pendanaan atau anggaran.

B. Pembahasan

Kawasan Karst Kabupaten Gunungkidul dikenal sebagai daerah yang rentan terhadap kerusakan lahan. Selama ini banyak pengelolaan kawasan yang tidak berorientasi lingkungan seperti pertambangan dan alih fungsi lahan yang akan semakin memperparah degradasi lahan di daerah

karst. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian mengenai pengelolaan kawasan. Pengelolaan kawasan dapat diartikan sebagai proses peran serta sumberdaya manusia secara berkesinambungan dan sistematis dalam pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya alam untuk membawa kawasan pada kondisi yang lebih baik pada masa yang akan datang dan memecahkan masalah kawasan pada saat ini. (Bobi, 2002: 3). Dalam pengelolaan kawasan karst, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul menggunakan tiga konsep pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan lingkungan/ekologi dan keberlanjutan sosial.

1. Analisis keberlanjutan ekonomi dalam proses pengelolaan kawasan karst di Kabupaten Gunungkidul

Keberlanjutan ekonomi terdiri atas keberlanjutan ekonomi makro (pemenuhan hak-hak dasar) dan keberlanjutan ekonomi sektoral (keberlanjutan pembangunan). Dalam pemanfaatan kawasan karst yang dieksploitasi menjadi lahan tambang bahan galian C sebenarnya keuntungan ekonomi yang didapatkan oleh masyarakat hanya bersifat sementara. Kerusakan lingkungan pada bentang lahan karst akibat kegiatan penambangan akan mengakibatkan matinya sumber air bawah tanah yang berlimpah, rusaknya vegetasi hutan, dan punahnya keanekaragaman hayati di kawasan karst yang secara tidak langsung akan merugikan masyarakat sekitar kawasan karst baik dimasa sekarang maupun dimasa depan.

Masyarakat melakukan eksploitasi kegiatan penambangan bahan galian C dengan alasan untuk pembukaan lahan, masyarakat Kabupaten Gunungkidul yang sebagian besar bekerja sebagai petani merasa penghasilan yang didapatkan masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kurangnya penghasilan yang didapatkan dari pertanian dan kurangnya keterampilan atau keahlian formal maupun non formal bidang pekerjaan lain dijadikan alasan masyarakat dengan melakukan kegiatan penambangan batu gamping, selain hasil yang didapatkan dari penambangan batu gamping dapat dirasakan secara langsung guna untuk mencukupi kekurangan kebutuhan sehari-hari masyarakat di kawasan karst.

Menurut Manulang (2005: 4), pengelolaan terdapat tiga pokok penting dalam pengertiannya pertama, adanya tujuan yang ingin dicapai; kedua, tujuan dicapai dengan mempergunakan kegiatan orang-orang lain; dan ketiga, kegiatan-kegiatan orang lain itu harus dibimbing dan diawasi. Oleh sebab itu, pemerintah daerah sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya proses pengelolaan kawasan karst demi mencapai tujuan keberlanjutan ekonomi masyarakat di kawasan karst harus mampu memimpin dan mengorganisasikan masyarakat agar ikut serta dalam suatu bentuk pemberdayaan pengelolaan kawasan karst di Kabupaten Gunungkidul. Bentuk pemberdayaan dari pemerintah kepada masyarakat di kawasan karst adalah dalam pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar seperti

memberikan pendidikan kepelatihan kepada masyarakat yang dapat dijadikan modal penting untuk peningkatan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan karst itu sendiri.

Supaya pengetahuan masyarakat tentang kawasan karst tetap terpakai realisasi pendidikan kepelatihan kepada masyarakat ditunjukkan dengan adanya program pengembangan masyarakat dapat direncanakan kegiatan pelatihan pemandu wisata. Pendidikan kepelatihan pemandu wisata selain untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat akan pengelolaan kawasan karst, juga untuk mengurangi ketergantungan masyarakat akan kegiatan penambangan batugamping di kawasan karst Kabupaten Gunungkidul. Tugas pemerintah dalam membimbing dan mengawasi jalannya program kegiatan pelatihan pemandu wisata kepada masyarakat harus terus berjalan sampai tujuan dari keberlanjutan ekonomi dalam proses pengelolaan kawasan karst di Kabupaten Gunungkidul dapat tercapai.

2. Analisis keberlanjutan lingkungan dalam proses pengelolaan kawasan karst di Kabupaten Gunungkidul

Untuk menjamin keberlanjutan lingkungan, menurut Djajadiningrat (2005) harus diupayakan adalah memelihara integritas tatanan lingkungan dan membatasi dampak lingkungan dengan pemanfaatan sekecil mungkin. Dalam memelihara integritas tatanan lingkungan upaya pengendalian pemanfaatan ruang/kawasan karst

berlandaskan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 dan Surat Edaran (SE) Nomor 540/0196 tertanggal 7 Februari 2011 oleh Bupati Gunungkidul mengenai pelarangan kegiatan penambangan di kawasan karst Kabupaten Gunungkidul yang masuk dalam Zonasi Kawasan Lindung Nasional. Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul salah satunya dengan melaksanakan tindakan evaluasi dan kontrol lapangan secara rutin melalui koordinasi antara Dinas Perekonomian Sub Dinas Pertambangan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam bentuk inspeksi mendadak terhadap lokasi-lokasi penambangan. Namun hingga saat ini masyarakat di kawasan karst masih ada yang melakukan kegiatan penambangan batugamping, alasan masyarakat tetap melakukan kegiatan penambangan sangatlah banyak dan berbeda-beda. Namun keinginan mereka tetap untuk satu tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di kawasan karst Kabupaten Gunungkidul.

Peningkatan kesejahteraan hidup melalui kegiatan penambangan batugamping jelas sekali bertentangan dengan peraturan yang ada, hal ini juga mengakibatkan bertambahnya kerusakan pada lingkungan ekologi di kawasan karst yang memang sudah rapuh karena kondisi fisik alami dari batugamping itu sendiri. Beberapa kelompok masyarakat penambang memang sudah ada yang sadar dan peduli akan keberlanjutan lingkungan di kawasan karst, mereka

melalui koordinasi dengan struktur terarah dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan serta Dinas Kehutanan Kabupaten Gunungkidul sepakat untuk melakukan tindakan penyelamatan lingkungan kawasan karst dan mengatasi kerusakan lahan di kawasan karst secara bersama. telah menunjukkan suatu bentuk nyata kegiatan reklamasi atau pemulihan bekas lahan penambangan. Program reklamasi pada lahan bekas penambangan diharapkan dapat mengalami kemajuan yang pesat pada seluruh kawasan karst dan efektif dalam rangka penanganan masalah kekritisian lahan di kawasan karst Kabupaten Gunungkidul.

Kawasan karst bukan tidak berarti tidak boleh dimanfaatkan, namun pemanfaatannya haruslah dilakukan dengan benar dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh dampak ekologis yang akan muncul. Sumberdaya karst dapat disebut sebagai sumberdaya yang tidak terbaharui karena memerlukan waktu hingga jutaan tahun untuk membentuk bentang lahan tersebut. Agar pemanfaatan potensi topografi karst di Kabupaten Gunungkidul dapat berjalan maksimal dan berkelanjutan, maka diperlukan bantuan berbagai pihak dalam rangka memaksimalkan potensi yang ada namun tetap mengikuti norma lingkungan yang ada. Koordinasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat sekitar kawasan karst dibutuhkan sebagai prasyarat jaminan keberlanjutan lingkungan kawasan karst.

3. Analisis keberlanjutan sosial dalam proses pengelolaan kawasan karst di Kabupaten Gunungkidul

Keberlanjutan sosial dinyatakan dalam kesetaraan sosial, dan peningkatan kualitas hidup manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mempertahankan keanekaragaman budaya dan ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kunci keberhasilan program pembangunan bukan terletak pada hebatnya lembaga pemegang pemerintahan, tetapi lebih ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya usaha penggalian potensi masyarakat yang menjadi satu kesatuan program dan pondasi kuat bagi keberlangsungan program pembangunan. Untuk itu, dibentuk kelompok-kelompok masyarakat yang mencerminkan kearifan dan budaya lokal, kaitannya dengan kegiatan sektoral dan ekonomis yang dilakukan, serta upaya meningkatkan fungsi ekologis lingkungan, seperti: kelompok masyarakat penambang, kelompok masyarakat pemerhati karst, atau kelompok-kelompok lain yang bersifat paguyuban dan kekeluargaan. Pemerintah tinggal menggali berbagai informasi terkait dengan program kegiatan setiap kelompok, kemudian memfasilitasi dan mengarahkan, sehingga masyarakat akan lebih responsif terhadap kebijakan Pemerintah Daerah dari pada memaksakan program kepada masyarakat. Dalam hal ini masyarakat akan merasa dihargai dan mempunyai jiwa *handarbeni* terhadap keberlangsungan sumberdaya alam dan kelestarian fungsi lingkungan

di kawasan karst. Beberapa persyaratan penting untuk keberlanjutan sosial dalam pengelolaan kawasan karst yaitu prioritas pengeluaran sosial dan program diarahkan untuk memberikan manfaat bersama baik bagi pemerintah maupun masyarakat di kawasan karst.

Pengembangan sumberdaya masyarakat di kawasan karst dengan tujuan untuk memperoleh kesetaraan dalam proses pengelolaan kawasan karst dapat dilakukan dengan meningkatkan peran para wanita. Dalam hal ini pemerintah daerah sudah memberikan pelayanan dalam bentuk program kegiatan pendidikan kewanitaan atau program PKK. Program kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang pengembangan dan pengelolaan kawasan karst yang baik dan benar dan secara arif bijaksana melalui prinsip pembangunan berkelanjutan. Pendidikan ini juga bertujuan untuk menciptakan jiwa *interpreneurship* yang juga memiliki sasaran menaikkan kesejahteraan masyarakat di kawasan karst.